PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SUMATERA BARAT CABANG SOLOK

Ridhatul Walidaini, Afriyeni

Akademi Keuangan dan Perbankan Padang

Afriyeni.yen@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat PT. BPD Sumatera Barat Cabang Solok. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif sebagai metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif mengenai prosedur pemberian kredit pada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Solok. Metode analisa ditinjau dari dua segi yang berbeda yaitu antara teori dan praktek yang perlu dipertemukan sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya, apakah perbedaan yang timbul menyangkut prinsip dasar konsep itu sendiri. Kesimpulan Pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh PT. Bank Pembanguna Daerah Sumatera Barat Cabang Solok sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka khususnya masyarakat menengah kebawah yang memiliki usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Kata Kunci: Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan rangkaian pembangunan seluruh aspek yang berkesinambungan dalam kehidupan bermasyarakat, Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu aspek pembangunan adalah di bidang ekonomi, perekonomian yang sehat dapat terwujud atas kerjasama pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Penyebaran yang merata dari hasil pembangunan di bidang ekonomi tersebut juga akan diwujudkan melalui kebijaksanaan yang serasi antara lain di bidang perbankan. Perbankan menempati posisi yang strategis dalam pembangunan dan perekonomian daerah, serta dalam pembagian pendapatan di dalam masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dan telah diperbaharui menjadi Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank beroperasi berlandaskan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat percaya bahwa dana yang disimpan atau dititipkan akan aman dan dapat diambil jika diperlukan. Begitu juga dengan bank, bank menaruh kepercayaan kepada masyarakat yang meminjam dana dari bank bahwa dana tersebut dapat kembali tepat pada waktunya.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, maka banyak bermunculan bank-bank yang menawarkan berbagai fasilitas layanan. Kunci kesuksesan manajemen bank adalah bagaimana bank melayani dengan sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan, serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian kredit. Kredit berarti kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur.

Kredit pada umumnya timbul karena manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk menghasilkan atau memperoleh barang dan jasa yang melebihi kemampuan dana yang dimilikinya. Agar dapat memenuhi keinginannya tersebut ia perlu mendapatkan kredit (pinjaman) dari pihak – pihak lain, baik itu orang lain maupun lembaga keuangan seperti bank.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit mempunyai unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari sipemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar – benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu.
- b. Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara prestasi dengan kontraprestasi (pengembaliannya) akan diterima dimasa yang akan datang.
- c. *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya.
- d. Prestasi yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Dalam keadaan normal, biasanya kegiatan kredit ini merupakan aktifitas terpenting dari sebuah bank, karena sebagian besar sumber pemasukannya berasal dari bunga kredit ini. Untuk itu penanganan kredit yang profesional merupakan suatu tuntutan yang paling pokok bagi suatu bank yang baik. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa salah satu fungsi bank adalah untuk menyalurkan kredit kepada debitur.

Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas layanan ini untuk meminjam uang yang nantinya dapat digunakan sesuai tujuan awal peminjaman. Keberadaan PT. BPD

Sumatera Barat sendiri sebagai suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan perbankan dan membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan manfaat yang besar baik dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat maupun penyaluran dana kepada masyarakat. Dengan adanya PT. BPD Sumatera Barat ini diharapkan dapat membatasi dan bahkan mengeliminir lembaga keuangan dan perkreditan non formal yang cenderung memberatkan masyarakat. Lembaga tersebut berupa berbagai versi sistem ijon serta pemberian kredit oleh pelepas uang atau rentenir, atau sering juga disebut sebagai lintah darat yang dianggap merugikan masyarakat karena mengenakan tingkat suku bunga yang tinggi.

Sebagai salah satu bentuk respon dan kepedulian PT. BPD Sumatera Barat untuk menyediakan dan memberikan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum *bankable* serta untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pengembangan sektor riil guna penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, maka PT. BPD Sumatera Barat telah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu Bank Pelaksana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-07/M.EKON/01/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.

Keikutsertaan PT. BPD Sumatera Barat dalam penyaluran KUR ini diharapkan mampu mendorong pengembangan UMKMK khususnya di Sumatera Barat, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerah dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pada tanggal 5 November 2007, Bapak Presiden Republik Indonesia meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui Perusahaan Penjamin. KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang memiliki usaha yang layak termasuk usaha layak namun belum bankable, dimana adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit, namun mengalami keterbatasan dalam hal memenuhi persyaratan agunan, perizinan formal dan sebagainya. UMKMK yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung yaitu UMKMK dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana dan dapat juga dilakukan secara tidak langsung yaitu UMKMK dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Pada awal-awal diluncurkan pemerintah, Bank Pelaksananya adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin. Untuk lebih meningkatkan penyaluran KUR tersebut dan agar KUR tersebut secara lebih cepat dapat disalurkan secara lebih merata ke daerah-daerah,

maka berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-07/M.EKON/01/2010 tanggal 26 Januari 2010 dilakukan penambahan Bank pelaksana dengan 13 (tiga belas) BPD dan salah satunya adalah PT. BPD Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan daerah yang potensial untuk penyaluran KUR, karena sebagian besar usaha produktif di Sumatera Barat terdiri dari UMKMK. Dengan keikutsertaan PT. BPD Sumatera Barat sebagai Bank Pelaksana KUR diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor riil dan program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam penyaluran KUR ini, PT. BPD Sumatera Barat akan memberikan perhatian yang lebih kepada jumlah usaha mikro yang dapat diakses atau dilayani. Perhatian lebih tersebut antara lain akan diwujudkan dalam bentuk keringanan persyaratan agunan, dokumen persyaratan kredit, proses yang lebih cepat, pelayanan jemput-antar, pemberian tarif yang ringan dan lainnya. Disamping KUR Mikro, maka juga diberikan dalam kelompok KUR Ritel dan KUR Linkage.

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui beberapa tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas penulis bermaksud membandingkan antara teori dan praktek dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Solok”.

METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data dan bahan untuk melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian, sebagai berikut :

Metode pengumpulan data

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Peninjauan langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer. Penelitian langsung ke lapangan ini akan dapat membantu penulis untuk melengkapi data yang diperlukan. Adapun cara riset lapangan ini adalah dengan mewawancarai langsung pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan atau instansi yang terkait.

b. Studi Perpustakaan. (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan ke perpustakaan berupa buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif sebagai metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif mengenai prosedur pemberian kredit pada PT. BPD Sumatera Barat Cabang Solok. Metode analisa ditinjau dari dua segi yang berbeda yaitu antara teori dan praktek yang perlu dipertemukan sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya, apakah perbedaan yang timbul menyangkut prinsip dasar konsep itu sendiri. Dengan menganalisa perbandingan, pertanyaan itu akan terjawab selanjutnya dan hasil analisa itu dipergunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Menurut Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Fungsi dan Jenis - jenis Bank

Fungsi bank yaitu sebagai penghubung (*intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit*) dan sebagai jasa keuangan perbankan. Di dalam Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan yang dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi harga.

Dari segi fungsi perbedaan terletak pada luas nya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasi. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan Bank syariah berdasarkan bagi hasil.

Jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagi segi antara lain:

a. Dilihat dari segi sifatnya

Dalam praktiknya jenis Bank dilihat dari sifatnya dibagi kedalam dua macam yaitu:

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan Pembayaran *Letter Of Credits* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

b) Bank Non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas Negara.

c) Dilihat dari segi fungsinya

a) Bank umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

a. Dilihat dari segi kepemilikannya.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

a) Bank milik Pemerintah

Yaitu baik akte kepemilikannya maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

b) Bank milik swasta nasional

Yaitu Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula keuntungan diambil oleh swasta pula.

b. Dilihat dari segi cara menentukan Harga

Yaitu cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Yang terbagi dalam dua kelompok yaitu:

a) Bank yang berdasarkan Prinsip konvensional

Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun Deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

b) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Yaitu menerapkan aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya, yang dikenal dengan prinsip bagi hasil.

Sumber – Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2011:65), yang dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Asal dana yaitu bersumber dari bank itu sendiri, yang didapat dari setoran modal pemegang saham dan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya.

Asal dana berikutnya didapat dari pihak ketiga yaitu berupa tabungan, deposito, giro dan berasal dari lembaga lainnya yaitu pinjaman antar bank, pinjaman bank-bank luar negeri kredit likuiditas Bank Indonesia dan surat Berharga Pasar Uang.

Kegiatan - kegiatan Bank

Kegiatan Bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*), dan memberikan jasa - jasa bank lainnya (*service*).

Adanya bank tentunya memberikan manfaat bagi banyak pihak, manfaat tersebut antara lain:

- a. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
- b. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
- c. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
- d. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
- e. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan

atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. 5 hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Pengertian Kredit

Secara etimologi, istilah kredit berasal dari Bahasa latin, yaitu "*credere*", yang berarti kepercayaan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* artinya kepercayaan, dengan demikian wirausahawan yang memperoleh kredit dari bank adalah berdasarkan pada kepercayaan dalam hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar sudah diyakini, karena dapat dikembalikan lagi oleh sipenerima kredit (nasabah) sesuai dengan waktu persyaratannya.

Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan kontra prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang sedangkan dalam arti ekonomi, kredit adalah pendanaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 12, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan".

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-Undang yang Diubah), pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 butir 11, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang yang Diubah, merumuskan pengertian "pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Prinsip Syari'ah, menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang yang Diubah, adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syaria'ah, antara lain: mudharabah, musharabah, murabahah, ijarah, dan ijarah wa iqtina.

Di dalam pemberian kredit, terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu, pihak yang berlebihan uang, disebut pemberian kredit (kreditor) dan pihak yang membutuhkan uang, disebut penerima kredit (debitur).

Disini dapat dilihat fungsi bank sebagai perantara antara pihak yang mempunyai dana lebih dan butuh rasa aman terhadap uang yang dimilikinya dengan

pihak yang sangat membutuhkan dana untuk membuka usaha baru atau pun melanjutkan usaha yang telah dijalani.

Bank merupakan lembaga *financial intermediary* berperan aktif sebagai perantara dari kedua belah pihak tersebut. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu secara efektif kepada melalui sektor usaha yang produktif. Sebagai lembaga perantara, bank diharapkan mampu turut serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara khusus dan peningkatan perekonomian secara khusus.

Fungsi dan Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Sinungan (2000:207), fungsi kredit secara luas yaitu:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Untuk meningkatkan peredaran barang
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f. Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.
- g. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional
- h. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Tujuan pokok dari pemberian kredit oleh suatu bank adalah:

- a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
- b. Meningkatkan efektivitas ekonomi atau kegiatan perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup bank dapat terjamin, mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dan penghasilan pokok bank.

Menurut Kasmir (2006:96), pada dasarnya tujuan pemberian kredit yaitu terdiri dari :

- a. Mencari keuntungan
- b. Membantu usaha nasabah
- c. Membantu pemerintah

Unsur – unsur dan Jenis – jenis Kredit

Menurut Suyatno, dkk (1995:15), unsur – unsur kredit yaitu:

- a. Kepercayaan

Adanya keyakinan dari pihak bank terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur yang akan dilunasinya sesuai dengan jangka waktu yang di perjanjikan.

b. **Jangka Waktu**

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, dimana jangka waktu tersebut sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu, berdasarkan kesepakatan bersama.

c. **Prestasi**

Adanya objek berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya kesepakatan dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah debitur, berupa bunga atau imbalan.

d. **Risiko.**

Adanya jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasannya, memungkinkan adanya risiko dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk itu, untuk mencegah terjadinya risiko tersebut (berupa wanprestasi), maka diadakan pengikatan jaminan/agunan yang dibebankan kepada pihak nasabah debitur.

Jenis kredit yaitu:

a. **Kredit Investasi.**

Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin.

b. **Kredit Modal Kerja**

Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk pembiayaan/pembelian bahan baku produksi.

c. **Kredit Konsumsi**

Kredit untuk perorangan untuk pembiayaan barang-barang pribadi seperti rumah (KPR-Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB-Kredit Kendaraan Bermotor), lain-lain seperti Kredit tanpa agunan.

d. **Kredit Usaha Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan**

Kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Indelsa.

Prinsip – prinsip Pemberian Kredit

Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (keadaan perekonomian), atau sering disebut sebagai 5C.

a. **Karakter**

Watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti

apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari *supplier* dan *customer* dari debitur. Selain itu dapat pula diperoleh dari Informasi Bank Sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum, karena informasi tersebut hanya dapat di akses oleh pegawai Bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang terhubung secara *on-line* dengan bank sentral.

b. Kapasitas

Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.

c. Modal

Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.

d. Jaminan

Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman.

e. Kondisi ekonomi

Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

Prosedur Pemberian Kredit

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dengan pemberian melalui pola langsung, secara tidak langsung dengan cara *executing/channeling* dan KUR tersebut dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Penerima KUR adalah orang perorangan, badan usaha yang termasuk kepada kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Kelompok Usaha dan Lembaga *Linkage* lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian pada peraturan pelaksanaan ini dan memiliki usaha produktif pada semua sektor ekonomi yang tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Permohonan

Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Permohonan dan dokumen persyaratan permohonan kredit/pembiayaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pelaksana kredit dalam hal menerima suatu permohonan kredit adalah :

- a) Surat permohonan diajukan secara tertulis oleh calon debitur diantaranya mencantumkan secara jelas tujuan surat, tanggal surat, data calon debitur dan maksud permohonan.
- b) Penerimaan permohonan dicatat pada buku registrasi dan diberikan nomor register, serta didisposisi oleh pejabat Bank berwenang untuk tindak lanjut atas surat permohonan tersebut.
- c) Hal-hal lainnya agar mempedomani Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit dan Dokumentasi dan Administrasi Kredit, atau pedoman pembiayaan syariah.

Dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai lampiran dan kelengkapan permohonan kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Perorangan
 - a) Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku.
 - b) Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan (dikecualikan bagi KUR yang tanpa agunan).
 - c) Foto debitur (suami/istri) dan usaha sebanyak 2 (dua) lembar.
 - d) Photo copy NPWP, untuk plafond kredit tertentu yang mempersyaratkannya.
 - e) Photo copy bukti kepemilikan agunan.
 - f) Photo copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g) Dikecualikan dari huruf f) diatas, maka untuk plafond kredit kecil dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka perizinan usaha dapat berupa salah satu dari :Surat Keterangan Usaha dari dinas/instansi/pengelola pasar (jika usaha berada di lingkungan pasar-pasar), atau; Surat Keterangan Ketua RT atau ketua RW atau lurah atau wali nagari (untuk usaha diluar pasar).
 - h) Untuk plafond diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), debitur wajib mempunyai laporan keuangan (minimal neraca, laba/rugi dan rasio keuangan), baik yang dibuat sendiri oleh debitur maupun yang dibantu pembuatannya oleh Bank berdasarkan wawancara dan *on the spot* (OTS), dan laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh debitur.
- 2) Badan Usaha (termasuk Koperasi)
 - a) Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) pengurus.
 - b) Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan (dikecualikan bagi KUR yang tanpa agunan).
 - c) Photo copy Anggaran dasar dan akta perubahan.
 - d) Photo copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e) Photo copy NPWP.
 - f) Laporan keuangan (Neraca, Rugi/Laba dan sebagainya),
 - g) Bukti *print out* SID atau surat lunas (bagi KUR Ritel dan KUR *Linkage*). Dokumen ini dilakukan oleh Bank.
 - h) Khusus untuk perseroan terbatas, menyerahkan persetujuan komisaris atau RUPS (sesuai dengan kewenangan dalam anggaran dasar),
 - i) Khusus untuk Koperasi, menyerahkan keputusan Rapat Anggota.

3) Lembaga Linkage

- a) Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) pengurus.
- b) Photo copy Kartu Identitas Diri (KTP/SIM) yang masih berlaku dari penjamin atau pemilik agunan (dikecualikan bagi KUR yang tanpa agunan).
- c) Photo copy anggaran dasar/akta perubahan atau aturan tertulis yang disepakati oleh seluruh anggota.
- d) Photo copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Photo copy NPWP, untuk plafond kredit tertentu yang mempersyaratkannya.
- f) Laporan keuangan (minimal neraca, laba/rugi dan rasio keuangan), baik yang dibuat sendiri oleh debitur maupun yang dibantu pembuatannya oleh Bank berdasarkan wawancara dan *on the spot* (OTS), dan laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh debitur,
- g) Bukti print out SID atau surat lunas. Dokumen ini dilakukan oleh Bank
- h) Photo copy Perjanjian Kerjasama dengan Bank.
- i) Khusus untuk BPR/BPRS, maka selain menyerahkan dokumen sebagaimana huruf a. sampai dengan h. diatas, maka BPR/BPRS tersebut menyerahkan dokumen tambahan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Kredit Kepada BPR (KK-BPR) sesuai SK Direksi nomor SK/038/DIR/01-2009 tanggal 30 Januari 2009 berikut perubahannya.

2) Identifikasi

Identifikasi permohonan kredit/pembiayaan dilakukan dengan mempedomani buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit.

3) Analisis kelayakan kredit

Analisis kelayakan kredit untuk KUR Mikro dan KUR dengan total plafond sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan formulir penilaian sebagaimana lampiran Peraturan Pelaksanaan ini. Apabila diperlukan untuk sektor kredit/pembiayaan tertentu, maka dapat dibuatkan formulir penilaian khusus dalam bentuk petunjuk teknis dan/atau surat yang terpisah dari peraturan pelaksanaan ini. Analisis kredit dapat menambahkan informasi dalam formulir tersebut apabila terdapat beberapa data lain yang perlu ditambahkan.

Analisis kelayakan kredit/pembiayaan untuk KUR dengan total plafond diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibuat berdasarkan aspek-aspek penilaian sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit atau pedoman pembiayaan atau hal-hal yang sudah lazim dilakukan dalam melakukan analisis kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.

Analisis kelayakan kredit/pembiayaan secara *executing* kepada BPR/BPRS, maka analisis kelayakannya dilakukan sebagaimana lazim dilakukan pada pemberian skim Kredit Kepada BPR (KK-BPR).

Pelaksanaan analisis kelayakan kredit/pembiayaan diatur sebagai berikut :

- a) Bagi Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Yang Mempunyai Petugas Khusus KUR

- b) Untuk KUR dengan plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Penerimaan permohonan, identifikasi permohonan, wawancara dan *on the spot* (OTS) dilakukan oleh Petugas Khusus KUR,
Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani bersama oleh Petugas Khusus KUR dan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Pengisian formulir penilaian kredit/pembiayaan, dilakukan oleh Petugas Khusus KUR. Formulir yang telah diisi tersebut kemudian ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR pada bagian yang telah disediakan. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR, kemudian diteruskan kepada Pemimpin Seksi Kredit untuk memperoleh keputusan. Ketentuan kewenangan memutus KUR sampai dengan Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) oleh Pemimpin Seksi Kredit merupakan pemberian kewenangan khusus dari ketentuan wewenang umum yang berlaku.
- c) Untuk KUR dengan plafond diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) :Penerimaan permohonan dan identifikasi permohonan dilakukan oleh Petugas Khusus KUR.
Wawancara dan *on the spot* (OTS) dilakukan oleh Petugas Khusus KUR bersama dengan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani bersama oleh Petugas Khusus KUR dan salah seorang analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Pengisian formulir penilaian kredit/pembiayaan, dilakukan oleh Petugas Khusus KUR. Formulir yang telah diisi tersebut kemudian ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR dan analis/petugas kredit pada bagian yang telah disediakan. Pemimpin Seksi Kredit terkait di Kantor Cabang/Cabang Pembantu memeriksa kebenaran dan kelayakan kredit/pembiayaan. Apabila sudah benar dan dinilai layak maka Pemimpin Seksi tersebut membubuhkan paraf pada setiap halaman formulir dan menandatangani usulan pada lembar tanda tangan. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh Petugas Khusus KUR, analis/petugas kredit dan Pemimpin Bagian/Seksi Kredit, kemudian diteruskan kepada pejabat pemutus kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku untuk memperoleh keputusan.
- d) Untuk KUR dengan plafond diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Penerimaan permohonan dan identifikasi permohonan dilakukan oleh unit kerja perkreditan di Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Wawancara dan *on the spot* (OTS) dilakukan oleh analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Apabila kredit/pembiayaan mempunyai agunan yang harus ditaksasi, maka penilaian agunan dilakukan dan ditandatangani dengan mempedomani prosedur taksasi agunan sebagaimana terdapat dalam ketentuan agunan yang berlaku. Pembuatan rekomendasi atau appraisal kredit/pembiayaan, dilakukan oleh analis/petugas kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu. Setiap halaman rekomendasi atau appraisal ditandatangani oleh analis/petugas kredit dan kemudian ditandatangani pada bagian akhir usulan. Pemimpin Seksi Kredit terkait

di Kantor Cabang/Cabang Pembantu memeriksa kebenaran dan kelayakan rekomendasi atau appraisal kredit/pembiayaan. Apabila sudah benar dan dinilai layak, maka Pemimpin Seksi tersebut membubuhkan paraf pada setiap halaman rekomendasi atau appraisal dan menandatangani pada bagian akhir usulan. Rekomendasi atau appraisal yang ditandatangani oleh analis/petugas kredit dan Pemimpin Seksi Kredit, kemudian diteruskan kepada Pejabat. Pemutus Kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku untuk memperoleh keputusan. Apabila dilakukan perubahan kebijakan terhadap pengaturan pelaksana analisis kelayakan kredit, disampaikan dengan Surat Direksi tersendiri.

4) Pemeringkatan kredit

Berdasarkan analisis kredit/pembiayaan, maka dilakukan pemeringkatan kredit dengan mempedomani Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit. Pelaksana proses pemeringkatan kredit/pembiayaan termasuk pengoperasiannya dalam aplikasi *rating system* adalah unit kerja Kantor Cabang/Cabang Pembantu terkait yang mempunyai tugas untuk itu. Pejabat Pemutus Kredit wajib mempertimbangkan hasil pemeringkatan kredit dalam membuat Keputusan Kredit

5) Wewenang dan keputusan kredit

Wewenang keputusan kredit mengacu kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Keputusan kredit oleh Pejabat Pemutus Kredit adalah berupa keputusan disetujui atau ditolak. Wewenang memberikan keputusan untuk KUR diatur khusus dan dikecualikan dari ketentuan kewenangan yang berlaku umum, yaitu sebagai berikut :

- a) Untuk KUR dengan plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), merupakan wewenang Pemimpin Seksi Kredit.
- b) Untuk KUR dengan plafond diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberikan oleh Pejabat Pemutus Kredit sesuai ketentuan wewenang yang berlaku. Keputusan kredit/pembiayaan yang disetujui diberitahukan/disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) yang ditandatangani oleh pejabat kredit sebagai berikut :
Untuk KUR dengan total plafond sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pemimpin Seksi Kredit Kantor Cabang/Cabang Pembantu terkait.
- c) Untuk KUR dengan total plafond diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pejabat yang mempunyai wewenang keputusan terhadap kredit tersebut.

Apabila kredit/pembiayaan yang disetujui tersebut kewenangannya berada diatas kewenangan Cabang atau Cabang Pembantu, maka SPPK atau SPPP ditandatangani oleh Pemimpin Cabang/Wakil Pemimpin Cabang (untuk Kantor Cabang) dan Pemimpin Cabang Pembantu (untuk Kantor Cabang Pembantu). Keputusan kredit/pembiayaan yang ditolak disampaikan kepada

debitur secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas dan bijaksana. Pejabat yang menandatangani surat penolakan adalah sama dengan pejabat pada ketentuan angka 4 huruf a s/d c diatas.

6) Perjanjian kredit

Penandatanganan perjanjian kredit atau akad pembiayaan berikut seluruh Perjanjian turutannya, dilaksanakan setelah Debitur menandatangani SPPK atau SPPP bermaterai cukup dan telah diserahkan kembali kepada Bank.

Dalam hal tertentu menurut pertimbangan Bank seperti nominal kredit yang relative besar dan/atau permasalahan hukum yang relatif kompleks, maka perjanjian kredit atau akad pembiayaan dapat dilakukan secara Notarial Akta. Dokumen perjanjian kredit atau akad pembiayaan minimal dibuat 2 (dua) rangkap :Rangkap pertama untuk Bank, Rangkap kedua untuk debitur dan diserahkan dengan memakai tanda terima.

7) Realisasi kredit

Realisasi kredit dilakukan setelah debitur menandatangani Surat SPPK atau SPPP diatas materai, menandatangani perjanjian kredit atau akad pembiayaan berikut turutannya, melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Realisasi kredit dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke rekening debitur dengan menggunakan warkat atau bukti cetakan transaksi dari komputer. Terhadap kredit/pembiayaan yang memerlukan penarikan secara bertahap, maka penarikan kredit/pembiayaan diajukan oleh debitur secara tertulis sesuai kebutuhan dan disetujui oleh Bank.

8) Pembukuan

Proses Pembukuan dilakukan oleh petugas bank.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. PT. BPD Sumatera Barat merupakan bank milik pemerintah daerah. Tujuan pendiriannya tidak hanya dilandasi oleh tujuann komersial semata, melainkan lebih banyak didorong oleh rasa kebangsaan yang tinggi dan hasrat yang kuat untuk membangkitkan semangat serta kemampuan golongan ekonomi lemah khususnya golongan pribumi, agar mereka mampu mengembangkan usahanya dan menunjang jiwa kewiraswastaan serta menunjang stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya.
- b. PT. BPD Sumatera Barat Cabang Solok merupakan badan / lembaga keuangan yang mempunyai andil yang besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa dan pembangunan terutama didaerah Solok.
- c. Struktur organisasi PT. BPD Sumatera Barat Cabang Solok dalam melakukan aktivitas usahanya merupakan struktur organisasi yang berbentuk organisasi garis dan staf.

- d. Produk dan Jasa yang ditawarkan oleh PT. BPD Sumatera Barat Cabang Solok adalah:
- a) Tabungan Sikoci
 - b) Simpeda
 - c) Deposito Berjangka
 - d) Rekening Giro
 - e) Kiriman uang dan inkaso
 - f) Tahari mabrur
 - g) Kredit personal
 - h) Kredit kepada TKI
 - i) Kredit kepada BPR
 - j) Kredit Modal Kerja Kontraktor
 - k) Kredit Usaha Rakyat
 - l) Kartu ATM
 - m) Safe Deposit Box
 - n) Menerima setoran PBB dan Pajak Negara lainnya
 - o) Menerima setoran iuran Listrik, PAM, Telpon dan lainnya
 - p) Melaksanakan pembayaran gaji/pensiunan pegawai negri.
- e. Pemberian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh PT. Bank Pembanguna Daerah Sumatera Barat Cabang Solok sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka khususnya masyarakat menengah kebawah yang memiliki usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- f. Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat PT. BPD Sumatera Barat Cabang Solok sebagai berikut:
- a) Tahap permohonan kredit
 - b) Tahap identifikasi
 - c) Tahap analisis kelayakan kredit
 - d) Tahap pemeringkatan kredit
 - e) Tahap wewenang dan keputusan kredit
 - f) Tahap perjanjian kredit
 - g) Tahap realisasi kredit
 - h) Tahap pembukuan

DAFTAR PUSTAKA

- Alanshari, F., & Marlius, D. (2018). Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Pembantu Bukittinggi. <https://doi.org/10.31227/osf.io/rsfhc>
- Albone, Abdul Aziz, dkk. (2009). *Panduan Penyusunan Proposal Penelitian dengan Mudah*. Yayasan Jihadul Khair Center: Padang.

- Amelia, L., & Marlius, D. (2018). Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kpc64>
- Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. (2011). *Sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan peraturan pelaksanaan kredit usaha rakyat* PT. BPD Sumatera Barat.
- Darmawanto, & Fernos, J. (2019). Prosedur Pemberian Kredit Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung. <https://doi.org/10.31227/osf.io/psqfy>
- Dendawijaya, Lukman. (2008). *Manajemen Perbankan*, Gramedia Indonesia , Jakarta
- Irawan, Prasetya. (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Press: Jakarta.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lufri. (2007). *Kiat Memahami dan Melakukan Penelitian*. Universitas Negri Padang Press: Padang
- Sinungan. Muchdarsyah, (2000), “*Dasar- dasar dan teknik manajemen Kredit*”. Bina aksara, Jakarta.
- Thomas Suyatno dkk, (1995), “*Dasar-Dasar Perkreditan*”, edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 *tentang perbankan*. Citra Umbara: Bandung.
- Undang – Undang Perbankan. (1999). Sinar grafika: Jakarta.
- Veithrizal Rivai dan Andria Permata Veithrizal. (2005). *Credit Management Handbook*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Warman Djohan. (2000). *Kredit Bank*. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Widayati, R. (2019). Aktivitas Pemberian Kredit Komersil Pada Bank Nagari Cabang Sijunjung. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QTVZ9>

- Widayati, R. (2019). Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/5HPAB>
- Widayati, R. (2019). Aktivitas Pemberian Kredit Usaha Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/EDPN4>
- Yasman, R., & Afriyeni, A. (2019). Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jorong Kampung Tengah (JKT) Pariaman Cabang Padang. <https://doi.org/10.31219/osf.io/c5ufr>